

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

A. Latar Belakang Masalah

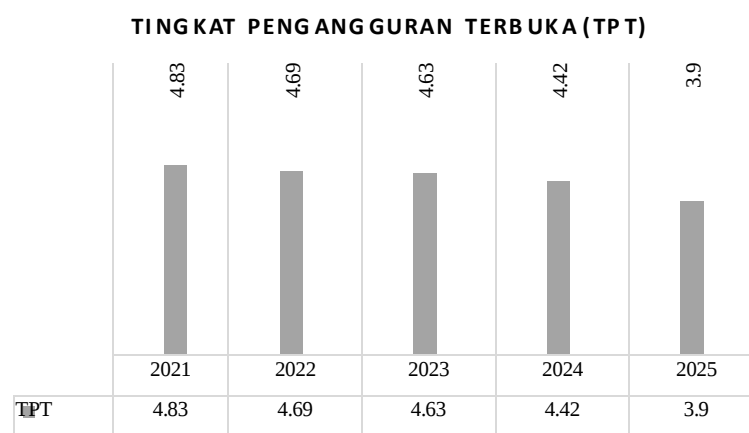
Fenomena pengangguran tetap menjadi tantangan krusial di negara berkembang yang belum teratasi sepenuhnya. Ketidakseimbangan antara keterbatasan lapangan kerja dan tingginya jumlah pencari kerja menjadi pemicu utama hambatan dalam mewujudkan kesempatan kerja produktif yang merata. Mengingat angkatan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahun, ketiadaan solusi pada aspek penyerapan tenaga kerja akan memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional (Suryono et al., 2022).

Pengangguran merupakan persoalan fundamental yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Isu ini tidak hanya berimplikasi pada dimensi sosial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, fenomena ini menjadi permasalahan nasional yang belum terselesaikan sepenuhnya akibat adanya diskoneksi informasi antara penyedia lapangan kerja dan pencari kerja. Selain itu, ketidakseimbangan struktural antara lonjakan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya dengan ketersediaan posisi di sektor industri menciptakan kesenjangan yang lebar. Kesulitan dalam penempatan tenaga kerja juga diperparah oleh adanya hambatan kualifikasi, di mana kompetensi pencari kerja sering kali tidak selaras dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan (Juventia & Rahmawati, 2022).

Permasalahan pengangguran yang terus berlangsung menunjukkan bahwa

keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kenyataannya tingkat pengangguran di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran sebagai dasar untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Tabel 1. TPT Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025



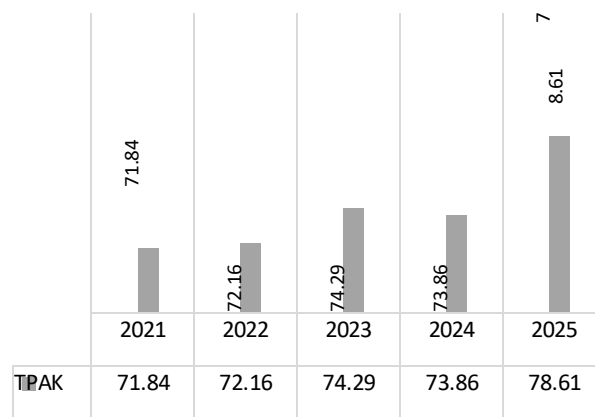
Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2026)

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur juga menghadapi tantangan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pengangguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu tahun 2021–2025 menunjukkan

bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 TPT tercatat sebesar 4,83%, kemudian menurun menjadi 4,69% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 4,63% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 angka tersebut turun menjadi 4,42% dan pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,9%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran, namun demikian angka tersebut masih menunjukkan adanya masyarakat yang belum terserap dalam dunia kerja sehingga perlu adanya program-program yang mampu mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri secara lebih efektif.

Tabel 2. TPAK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2025

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)



Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2026)

Selain melihat tingkat pengangguran, kondisi ketenagakerjaan juga dapat dianalisis melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data BPS Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa TPAK mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 TPAK tercatat sebesar 71,84%,

meningkat menjadi 72,16% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 74,29% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 angka tersebut sedikit menurun menjadi 73,86%, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 78,61%. Peningkatan TPAK menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat usia produktif yang aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pencari kerja maupun sebagai pekerja. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mampu menyediakan akses informasi lowongan pekerjaan serta memperluas kesempatan kerja agar meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat diimbangi dengan tersedianya peluang kerja yang memadai.

Permasalahan pengangguran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Banyak lulusan pendidikan yang kesulitan memperoleh pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Hermawan et al., 2023). Selain itu, peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang terus meningkat menyebabkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin tinggi. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, maka hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan secara lebih efektif (Dian Safitri & Rezza, 2025).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah melalui penyelenggaraan Program Job Fair. Program ini merupakan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam satu tempat sehingga proses rekrutmen dapat berlangsung secara lebih cepat dan efisien. Job fair juga memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, serta proses rekrutmen yang dilakukan oleh Perusahaan. Program job fair juga menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Melalui kegiatan ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia industri. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program job fair dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, karena kegiatan ini mampu mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung (Af'idah Zahrotul, 2025).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan program yang dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Salah satu bentuk pelaksanaan dari ketentuan tersebut adalah penyelenggaraan Program Job Fair. Program ini menjadi sarana yang disediakan pemerintah untuk mempertemukan

pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Melalui Job Fair, pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung, menyerahkan lamaran kepada perusahaan, serta mengikuti proses rekrutmen dengan lebih mudah. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh kemudahan dalam mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan (UU Nomor 13, 2003)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah bidang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai program yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya.

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah perlu menyediakan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi pencari kerja yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Pelayanan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan informasi pasar kerja, fasilitasi proses rekrutmen, pelatihan kerja, hingga penyelenggaraan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (UU Nomor 23, 2014).

Di tingkat daerah, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan, termasuk dalam upaya mengurangi pengangguran. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang berbagai program ketenagakerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu bentuk program tersebut adalah penyelenggaraan job fair yang melibatkan berbagai perusahaan serta masyarakat pencari kerja (Addinari et al., 2025).

Di Kabupaten Bojonegoro, salah satu program yang dilaksanakan untuk mendukung pelayanan ketenagakerjaan adalah Program Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Program ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan dalam satu kegiatan. Melalui Job Fair, pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung, berkonsultasi dengan perusahaan, menyerahkan berkas lamaran, hingga mengikuti tahapan awal proses rekrutmen. Sementara itu, perusahaan juga memperoleh kemudahan dalam menjaring calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan.

Meskipun demikian, penyelenggaraan Program Job Fair perlu terus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah

perusahaan dan pencari kerja yang berpartisipasi, tetapi juga dari efektivitas program dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan hingga menghasilkan penempatan kerja. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan, penyebaran informasi kegiatan, maupun tingkat keberhasilan proses rekrutmen setelah pelaksanaan Job Fair.

Tabel 3. Rekapitulasi Data *Job Fair* Tahun 2024-2026

Keterangan	Tahun		
	2024	2025	2026
Tanggal Pelaksanaan	05/12/2024	26/11/2025	02/04/2026
Jumlah Peserta	811	2.252	445
Jumlah Perusahaan	20	34	9
Jumlah Pelamar	669	1.433	242
Jumlah Penempatan	22	305	27

Sumber: Data DISPERINAKER Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data rekapitulasi Job Fair Kabupaten Bojonegoro tahun 2024–2026, pelaksanaan program menunjukkan hasil yang berbeda-beda setiap tahun. Pada tahun 2024, Job Fair dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 811 orang, jumlah perusahaan sebanyak 20 perusahaan, jumlah pelamar sebanyak 669 orang, dan jumlah penempatan kerja sebanyak 22 orang. Pada tahun 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 2.252 orang, perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 34 perusahaan, jumlah pelamar sebanyak 1.433 orang, dan penempatan kerja mencapai 305 orang. Sementara itu, pada tahun 2026, jumlah

peserta menurun menjadi 445 orang, perusahaan yang terlibat sebanyak 9 perusahaan, jumlah pelamar sebanyak 242 orang, dan penempatan kerja sebanyak 27 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa Program Job Fair di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan kontribusi terhadap proses penempatan tenaga kerja, terutama pada tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan antara jumlah peserta, jumlah pelamar, dan jumlah penempatan kerja, terlihat bahwa jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan masih relatif terbatas. Misalnya, pada tahun 2024 terdapat 669 pelamar, tetapi hanya 22 orang yang berhasil ditempatkan bekerja. Pada tahun 2025 terdapat 1.433 pelamar dengan 305 orang yang ditempatkan. Sementara pada tahun 2026 terdapat 242 pelamar dengan 27 orang yang berhasil ditempatkan. Perbedaan antara jumlah pelamar dan jumlah penempatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Job Fair belum sepenuhnya mampu menyerap pencari kerja yang mengikuti kegiatan.

Kondisi tersebut menjadi alasan penting perlunya evaluasi terhadap Program Job Fair di Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya dalam membantu mengurangi pengangguran terbuka melalui proses rekrutmen. Evaluasi juga penting untuk melihat apakah pelaksanaan Job Fair sudah efektif, efisien, tepat sasaran, merata, responsif terhadap kebutuhan pencari kerja, serta benar-benar sesuai sebagai solusi atas persoalan ketenagakerjaan di daerah. Dengan evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek yang sudah berjalan baik dan aspek yang masih perlu

diperbaiki, baik dari sisi penyelenggaraan, jumlah perusahaan peserta, jenis lowongan yang tersedia, kesesuaian kualifikasi pelamar, maupun tindak lanjut setelah kegiatan selesai.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang mampu mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan program job fair sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Evaluasi

Program *Job Fair* dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka Melalui Proses Rekrutmen di Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program job fair serta menilai sejauh mana program tersebut mampu berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang semestinya terjadi dengan kenyataan yang ada. Adanya kesenjangan tersebut nantinya menuntun peneliti untuk mencari mengapa kesenjangan terjadi, sehingga pertanyaan permasalahan tersebut dapat dikembangkan. Menurut Sugiyono, rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, bentukbentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana evaluasi Program Job Fair dalam mengurangi pengangguran terbuka melalui proses rekrutmen di Kabupaten Bojonegoro?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Job Fair Bojonegoro dalam menekan Angka Pengangguran Terbuka melalui keberhasilan proses rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro.

2) Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi akademik, sarana penerapan ilmu bagi mahasiswa, serta masukan bagi Dinas Tenaga Kerja Bojonegoro untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program job fair dalam mengurangi pengangguran.

b. Secara Praktis

1) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia akademik sebagai referensi tambahan serta memperkaya literatur mengenai evaluasi program Job Fair ketenagakerjaan di tingkat daerah.

2) Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, baik di bidang evaluasi program maupun ketenagakerjaan.

3) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan program *job fair*. Hasil evaluasi mengenai proses rekrutmen dan dampaknya terhadap pengurangan pengangguran terbuka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran di masa mendatang

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan struktur isi kajian skripsi ini, maka peneliti membaginya ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas alasan terkait dengan judul penelitian yang deskripsikan di Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan berbagai macam teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan jadwal penelitian, tahap penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan membahas bab yang sekaligus memberikan jawaban tujuan penelitian, dan saran yang disampaikan sebagai masukan terkait permasalahan dan masalah penelitian.